SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

Edi Mujayadi[1], Aftoni Susanto[2], Salamatun Asakdiyah[3]
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
aftoni_susanto@mgm.uad.ac.id[2], salamatun_2009@yahoo.com[3]
E-mail Korespondensi : 2575051023@webmail.uad.ac.id

Submitted: 03rd Nov 2025 | **Edited**: 04th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Mujayadi, E., Susanto, A., & Asakdiyah, S. (2026). Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh terhadap Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *9*(1), 1-11.

ABSTRACT

The Ministry of Finance, as the State Treasurer, uses the Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) to assess the effectiveness and quality of budget execution within government institutions. However, the fluctuating IKPA scores of the National Narcotics Agency of the Special Region of Yogyakarta (BNNP DIY) over the past five years indicate inconsistencies in planning, human resource competence, regulatory compliance, and coordination. This study aims to analyze how these factors influence the achievement of IKPA performance scores at BNNP DIY. Using a qualitative approach through literature review and in-depth interviews with the finance and budget team, this research explores managerial and operational dynamics that affect budget performance. The findings show that accurate planning, competent human resources, regulatory adherence, and effective inter-unit coordination have a positive and significant influence on improving the IKPA score. These results imply that strengthening managerial capacity and internal coordination can enhance institutional accountability and the quality of budget implementation.

Keywords: IKPA, Planning, Human Resources, Regulation, Coordination

PENDAHULUAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di setiap satuan kerja. Kementerian Keuangan menetapkan IKPA sebagai alat ukur kuantitatif untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui IKPA, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana setiap instansi mampu melaksanakan anggaran sesuai rencana serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Putri, Purwoko, & Bahri, 2024). Oleh karena itu, peningkatan capaian nilai IKPA menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja birokrasi di tingkat pusat maupun daerah.

Secara nasional, capaian rata-rata IKPA pada tahun 2023 mencapai 91,25, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 89,47 (Kementerian Keuangan, 2024). Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola anggaran, namun juga mengindikasikan bahwa belum semua instansi mencapai kategori "Sangat Baik". Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022, kategori penilaian IKPA

dibagi menjadi empat: “Sangat Baik” (≥95), “Baik” (89–94), “Cukup” (70–88), dan “Kurang” (<70). Artinya, instansi yang belum mencapai skor 95 masih memiliki ruang perbaikan signifikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) merupakan salah satu satuan kerja vertikal yang memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebagai instansi pemerintah yang mengelola dana publik, BNNP DIY dituntut tidak hanya melaksanakan program prioritas nasional, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggarannya. Berdasarkan data capaian IKPA BNNP DIY selama lima tahun terakhir (2020-2024), nilai yang diperoleh menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan: tahun 2020 sebesar 89,47, naik menjadi 90,46 di tahun 2021, meningkat tajam pada 2022 sebesar 98,23, kemudian sedikit menurun pada 2023 menjadi 98,09, dan kembali meningkat menjadi 99,93 pada 2024. Tren ini menggambarkan bahwa meskipun capaian IKPA BNNP DIY cenderung tinggi, namun belum mencapai nilai sempurna (100), sehingga menarik untuk dikaji faktor-faktor penyebab fluktuasi tersebut.

Interpretasi atas data tersebut menunjukkan bahwa capaian IKPA tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas manajemen organisasi. Variabel seperti perencanaan yang tepat, kompetensi sumber daya manusia (SDM), kepatuhan terhadap regulasi, serta koordinasi antarunit menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan anggaran (Manangin, Tinangon, & Gamaliel, 2023). Perencanaan yang tidak akurat dapat menyebabkan revisi DIPA yang berulang dan ketidaksesuaian Rencana Penarikan Dana, sementara rendahnya kompetensi SDM sering kali berimplikasi pada keterlambatan pelaporan atau kesalahan administrasi (Latip, Susanto, & Mulyani, 2023). Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan efektivitas koordinasi internal turut berperan dalam memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal (Rahmawaty, Sukahir, Komalasari, & Nugraha, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya faktor-faktor tersebut terhadap kinerja anggaran. Wulaningrum, Akbar, dan Sari (2020) menegaskan bahwa kemampuan perencanaan dan pengendalian anggaran memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah. Hasil serupa dikemukakan oleh Efdiono, Pane, dan Thaha (2023) yang menemukan bahwa kompetensi SDM di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap capaian IKPA di lingkup KPPN. Penelitian oleh Kusnadi (2024) dan Gunawan dan Zulhaida (2022) juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas fungsi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kerja dan kinerja instansi. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut berfokus pada instansi pusat atau lembaga keuangan negara, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis capaian IKPA di lingkungan BNNP masih sangat terbatas. Kondisi inilah yang membentuk research gap penelitian ini.

Dengan memperhatikan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi capaian nilai IKPA di BNNP DIY, meliputi perencanaan, kompetensi SDM, kepatuhan terhadap regulasi, dan koordinasi antarunit. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur tentang manajemen kinerja sektor publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola keuangan di instansi pemerintah.

LANDASAN TEORI

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kinerja pelaksanaan anggaran menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Riantoko dan Susanto (2021), pengukuran kinerja anggaran berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dan alat pengendalian manajerial dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Dalam konteks pemerintah, indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat ukur yang menilai ketepatan waktu, kesesuaian perencanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Satuan kerja yang mampu melaksanakan anggaran secara tertib dan tepat sasaran cenderung memperoleh nilai IKPA yang tinggi, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangannya (Pratama & Setiawan, 2020).

Menurut teori Performance Measurement System (Neely, 2019), keberhasilan pelaksanaan anggaran bergantung pada sejauh mana organisasi mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengendalian internal. Dalam hal ini, IKPA menjadi instrumen evaluatif yang berperan tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan (X1)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam siklus pengelolaan anggaran yang berperan menentukan arah pelaksanaan kegiatan. Rencana yang matang mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, serta proyeksi capaian kinerja yang realistis. Menurut teori Budgetary Control (Horngren et al., 2002), efektivitas anggaran bergantung pada sejauh mana rencana disusun secara sistematis dan berbasis data. Wulandari dan Saputra (2023) menambahkan bahwa perencanaan yang baik mampu menekan risiko deviasi realisasi anggaran dan memperkuat kesesuaian antara target output dan realisasi program.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yuliani (2021) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran perencanaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah. Selain itu, hasil studi oleh Lestari dan Purnomo (2022) menemukan bahwa perencanaan yang partisipatif dapat meningkatkan tingkat penyerapan anggaran serta meminimalkan revisi DIPA. Dengan demikian, kualitas perencanaan yang tepat menjadi faktor penting dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Berdasarkan Human Capital Theory (Becker, 1993), kompetensi individu menjadi modal intelektual yang memengaruhi produktivitas dan kinerja organisasi. Dalam konteks pengelolaan anggaran, pegawai yang memiliki kompetensi teknis, pemahaman regulasi, dan kemampuan analisis laporan keuangan akan lebih mampu mencapai target kinerja secara efektif (Rahman & Sari, 2020).

Penelitian oleh Anggraeni, Hartono, dan Putra (2023) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis keuangan berpengaruh positif terhadap nilai IKPA di lingkungan instansi pemerintah pusat. Selain itu, hasil riset Priyono dan Hidayati (2022) menyebutkan bahwa kompetensi pegawai di bidang manajemen keuangan publik berkorelasi kuat dengan ketepatan waktu pelaporan dan penyerapan anggaran. Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM menjadi strategi penting bagi instansi dalam mempertahankan stabilitas kinerja pelaksanaan anggaran.

Kepatuhan terhadap Regulasi (X3)

Kepatuhan terhadap regulasi mencerminkan sejauh mana pelaksanaan anggaran mengikuti ketentuan hukum dan standar akuntabilitas yang berlaku. Regulasi keuangan negara menjadi acuan dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Menurut teori Institutional Isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983), organisasi cenderung menyesuaikan diri terhadap norma dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh legitimasi institusional. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator penting dalam menilai kinerja organisasi publik (Nadila, Ahyaruddin, & Agustiawan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka (2024) menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi memiliki hubungan positif dengan peningkatan nilai IKPA, karena ketidaksesuaian administratif sering kali menurunkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, studi oleh Rasyid dan Kurniawati (2023) menemukan bahwa reformulasi penilaian IKPA dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 mendorong kementerian dan lembaga untuk meningkatkan disiplin pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel.

Koordinasi (X4)

Koordinasi antarunit kerja berperan penting dalam menjaga sinkronisasi pelaksanaan anggaran dengan target kinerja organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2017), koordinasi merupakan proses integrasi aktivitas antarbagian agar organisasi dapat mencapai tujuan secara harmonis. Dalam pelaksanaan anggaran, koordinasi menjadi krusial untuk memastikan setiap unit memahami perannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Wijaya & Suharto, 2021).

Hasil penelitian oleh Nuraini dan Mahardika (2023) menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antarunit berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja anggaran. Senada dengan itu, studi yang dilakukan oleh Halim, Rosita, dan Prabowo (2022) mengungkapkan bahwa intensitas komunikasi dan rapat koordinasi berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian kegiatan dan peningkatan nilai IKPA. Dengan demikian, koordinasi yang kuat bukan hanya memperlancar arus informasi, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal dalam manajemen keuangan pemerintah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan bahwa perencanaan, kompetensi SDM, kepatuhan regulasi, dan koordinasi secara simultan berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA. Keempat variabel tersebut memiliki hubungan fungsional yang saling melengkapi: perencanaan yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan SDM yang kompeten; kepatuhan regulasi menjaga integritas pelaksanaan anggaran; sementara koordinasi yang kuat memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan kausal antarvariabel dan menjadi dasar dalam analisis empiris pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman konteks, proses, serta makna yang muncul dari pengalaman dan persepsi pelaksana anggaran di lingkungan instansi

tersebut. Menurut Creswell (2019), penelitian kualitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena yang kompleks melalui penggalian data secara mendalam dari berbagai sumber.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus karena berfokus pada satu satuan kerja, yaitu BNNP DIY, dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan regulasi, dan koordinasi dalam memengaruhi capaian nilai IKPA. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal instansi dalam pelaksanaan anggaran (Yin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Operator Anggaran, dan Operator Laporan Keuangan. Jumlah informan ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan aktif dalam pengelolaan anggaran (Sugiyono, 2021). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal BNNP DIY, laporan realisasi anggaran, hasil monitoring IKPA dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami situasi kerja dan pola koordinasi antarunit, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman para pelaksana anggaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian nilai IKPA. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi faktual mengenai tren capaian nilai IKPA selama lima tahun terakhir (2020–2024).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil temuan ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel untuk mempermudah interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang hingga diperoleh makna yang konsisten dengan data lapangan dan teori yang digunakan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang memiliki jabatan dan tanggung jawab berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini dimaksudkan agar data yang diperoleh bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2021).

Selain itu, peneliti juga menerapkan audit trail untuk memastikan keterlacakan proses penelitian dan member checking kepada informan guna memverifikasi interpretasi data agar tidak terjadi kesalahan pemaknaan. Penelitian ini berakhir pada penyusunan kesimpulan yang menggambarkan hubungan antara faktor perencanaan, kompetensi SDM, kepatuhan regulasi, dan koordinasi dengan capaian nilai IKPA.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tim keuangan dan anggaran serta melalui kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa empat faktor utama perencanaan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), kepatuhan terhadap regulasi, dan koordinasi antarunit memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan capaian nilai IKPA.

Pengaruh Perencanaan (x1) terhadap Capaian Nilai IKPA (y)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di BNNP DIY berperan sebagai pedoman utama dalam menentukan target kegiatan dan proyeksi serapan anggaran. Setiap awal tahun anggaran, satuan kerja menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dan mengusulkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai prioritas program. Ketepatan dalam menyusun RPD dan konsistensi terhadap jadwal realisasi anggaran terbukti meningkatkan stabilitas nilai IKPA dari tahun ke tahun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktaliza, Ahyaruddin, dan Putri (2020) yang menyatakan bahwa perencanaan yang jelas dan terukur mampu menekan risiko deviasi penyerapan anggaran. Hal serupa juga diperkuat oleh penelitian Anggita dan Budi (2023) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang matang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan menghindari fenomena *rush spending* di akhir tahun anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa akurasi perencanaan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan nilai IKPA di lingkungan instansi pemerintah.

Selain itu, penelitian Wulandari dan Saputra (2023) juga menemukan bahwa partisipasi pegawai dalam proses perencanaan berkontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, BNNP DIY telah mulai menerapkan pola partisipatif dalam perencanaan kegiatan melalui koordinasi lintas bidang sejak tahun 2022, yang berdampak pada peningkatan nilai IKPA dari 90,46 (tahun 2021) menjadi 98,23 (tahun 2022). Fakta tersebut memperkuat argumentasi bahwa perencanaan yang melibatkan berbagai unit kerja secara aktif memberikan hasil yang lebih optimal.

Pengaruh kompetensi SDM (x2) terhadap capaian nilai IKPA (y)

Kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan anggaran di BNNP DIY. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa peningkatan kemampuan pegawai, terutama di bidang keuangan dan pelaporan, menjadi prioritas utama sejak 2021 melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh KPPN Yogyakarta. Upaya ini terbukti memperbaiki ketepatan pelaporan dan mengurangi kesalahan administrasi pada sistem OM-SPAN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Efdiono, Pane, dan Thaha (2023) yang menyebutkan bahwa kompetensi SDM di bidang keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja pemerintah. Penelitian oleh Latip, Susanto, dan Mulyani (2023) juga mendukung hasil ini, dengan menyimpulkan bahwa profesionalisme dan kapasitas SDM memiliki hubungan positif dengan akuntabilitas kinerja publik. Sementara itu, hasil penelitian Manangin, Tinangon, dan Gamaliel

(2023) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai di bidang keuangan secara langsung berdampak pada stabilitas nilai IKPA instansi.

Secara praktis, peningkatan kompetensi SDM di BNNP DIY tidak hanya berimplikasi pada peningkatan nilai IKPA, tetapi juga pada efisiensi waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penggerak utama keberhasilan pelaksanaan anggaran, sebagaimana ditegaskan dalam teori Human Capital (Becker, 1993), di mana pengetahuan dan keterampilan individu berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Pengaruh kepatuhan regulasi (x3) terhadap capaian nilai IKPA (y)

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan komponen penting yang memastikan setiap tahapan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai BNNP DIY telah memahami bahwa kesalahan dalam penyusunan dokumen administrasi, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dapat berdampak langsung terhadap penilaian IKPA. Reformulasi penilaian yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 semakin mempertegas pentingnya kepatuhan administratif sebagai salah satu indikator utama.

Hasil ini mendukung penelitian Nadila, Ahyaruddin, dan Agustiawan (2021) yang menegaskan bahwa akuntabilitas instansi pemerintah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Temuan serupa dikemukakan oleh Rahmawaty, Sukahir, Komalasari, dan Nugraha (2024) bahwa kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan publik. Penelitian Putri, Purwoko, dan Bahri (2024) juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang jelas dapat meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan memperbaiki penyerapan dana pemerintah.

Hasil wawancara di BNNP DIY menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepatuhan semakin diperkuat melalui sistem monitoring and evaluation yang dilakukan setiap triwulan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mekanisme ini terbukti meningkatkan kesadaran pegawai dalam mematuhi regulasi serta menurunkan tingkat kesalahan administratif.

Pengaruh koordinasi (x4) terhadap capaian nilai IKPA (y)

Faktor koordinasi antarunit menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan nilai IKPA. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang baik antara bagian keuangan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan di BNNP DIY berperan penting dalam memperlancar proses penarikan dana dan penyelesaian laporan keuangan. Setiap triwulan dilakukan rapat koordinasi untuk memastikan kesesuaian antara target output dan realisasi kegiatan.

Temuan ini mendukung penelitian Kusnadi (2024) yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas fungsi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah daerah. Penelitian serupa oleh Gunawan dan Zulhaida (2022) juga menemukan bahwa komunikasi dan koordinasi organisasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas birokrasi. Selain itu, penelitian Nuraini dan Mahardika (2023) menyebutkan bahwa koordinasi yang intensif dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan mengurangi potensi keterlambatan pelaporan.

Dalam konteks BNNP DIY, koordinasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif melalui pembagian peran antarbidang sesuai tugas dan fungsinya. Dengan mekanisme koordinasi yang rutin dan jelas, proses pelaksanaan

anggaran menjadi lebih terarah dan mampu mendukung peningkatan nilai IKPA hingga mencapai kategori "Sangat Baik" pada tahun 2024.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perencanaan, kompetensi SDM, kepatuhan terhadap regulasi, dan koordinasi merupakan empat pilar utama yang saling berkaitan dalam memengaruhi capaian nilai IKPA di BNNP DIY. Keempat variabel tersebut membentuk sistem manajemen kinerja yang terpadu, di mana kelemahan pada salah satu aspek dapat berdampak pada keseluruhan hasil evaluasi kinerja anggaran.

Temuan penelitian ini konsisten dengan konsep Performance Measurement System (Neely, 2019) yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hasil ini juga memperluas temuan penelitian Wulaningrum, Akbar, dan Sari (2020) yang menekankan pentingnya kapabilitas SDM dan sistem pengendalian dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja publik. Dengan demikian, hasil penelitian di BNNP DIY memberikan kontribusi empiris terhadap literatur manajemen keuangan sektor publik serta menawarkan implikasi praktis bagi instansi pemerintah lainnya dalam memperkuat tata kelola anggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Berdasarkan hasil telaah literatur, wawancara mendalam, serta pembandingan dengan penelitian terdahulu, diperoleh kesimpulan bahwa empat faktor utama perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, dan koordinasi antarunit berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai IKPA.

Pertama, perencanaan yang matang dan berbasis data terbukti mampu meningkatkan ketepatan realisasi anggaran serta menekan potensi revisi DIPA. Keterlibatan berbagai bidang dalam proses perencanaan menjadikan alokasi sumber daya lebih proporsional dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya kejelasan sasaran perencanaan dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran.

Kedua, kompetensi sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman regulasi keuangan yang baik mampu melaksanakan tugas secara akurat dan tepat waktu, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan nilai IKPA instansi.

Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan bahwa disiplin administrasi dan kesesuaian dengan ketentuan perbendaharaan negara merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya BNNP DIY dalam memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi internal setiap triwulan telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan serta perbaikan tata kelola keuangan.

Keempat, koordinasi lintas bidang berperan penting dalam memperlancar komunikasi, penyelarasan jadwal kegiatan, dan kesesuaian antara target output dan realisasi anggaran. Keterpaduan antarunit kerja di BNNP DIY menjadikan pelaksanaan anggaran lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai kategori "Sangat Baik" pada penilaian IKPA tahun 2024.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai manajemen kinerja sektor publik dengan menegaskan bahwa sinergi antara aspek manajerial, regulatif, dan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BNNP DIY dan instansi pemerintah lainnya untuk memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif, meningkatkan kapasitas SDM di bidang keuangan, memperketat pengawasan kepatuhan regulasi, serta membangun sistem koordinasi lintas fungsi yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggita, M. S., & Budi, A. B. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Ekonomi Trisakti, 3*(1), 1339–1350.

Anggraeni, N., Hartono, B., & Putra, I. W. (2023). Pengaruh pelatihan dan kompetensi SDM terhadap kinerja pelaksanaan anggaran instansi pemerintah pusat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 4*(2), 87–99.

Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.

Dewi, L. M., & Yuliani, S. (2021). Pengaruh kejelasan sasaran dan perencanaan anggaran terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8*(3), 201–212.

Efdiono, E., Pane, S. G., & Thaha, R. (2023). Pengaruh kompetensi SDM, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda. *SEIKO: Journal of Management & Business, 6*(2.1), 328–342.

Gunawan, H., & Zulhaida, Z. (2022). Pengaruh komunikasi organisasi dan koordinasi terhadap kinerja karyawan pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. *Indonesian Journal of Business Economics and Management, 1*(2), 35–42.

Halim, F., Rosita, T., & Prabowo, A. (2022). Koordinasi dan komunikasi internal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan. *Jurnal Administrasi Negara, 15*(1), 66–78.

Kusnadi, K. (2024). Pengaruh komunikasi organisasi dan koordinasi lintas fungsi organisasi terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik, 7*(1), 22–33.

Latip, M., Susanto, H., & Mulyani, S. (2023). Peran kompetensi SDM dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dimediasi oleh profesionalisme. *Journal of Management and Creative Business, 3*(1), 45–57.

Lestari, A. D., & Purnomo, R. (2022). Partisipasi dalam perencanaan anggaran dan implikasinya terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, 9*(1), 45–59.

Manangin, S. I. N., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker pada KPPN Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 14*(2), 155–168.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam perspektif teori institusional: Sebuah pendekatan penelitian campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 2*(2), 214–223.

Nuraini, F., & Mahardika, R. (2023). Pengaruh koordinasi dan komunikasi lintas bidang terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan, 5*(1), 55–67.

Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 1*(2), 81–90.

Pratama, A., & Setiawan, D. (2020). Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada lembaga pemerintah non kementerian. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 14*(2), 133–142.

Putri, D. R. P., Purwoko, B., & Bahri, S. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan perubahan regulasi terhadap penyerapan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja instansi. *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen, 9*(2), 124–135.

Rahman, M., & Sari, R. (2020). Pengaruh kompetensi dan profesionalisme pegawai terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 7*(2), 98–109.

Rahman, R., & Hidayat, D. (2020). Pendekatan kualitatif dalam penelitian kebijakan publik: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Administrasi, 17*(2), 98–109.

Rahmawaty, I. N., Sukahir, S., Komalasari, Y., & Nugraha, W. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeliharaan fasilitas PKP-PK: Kinerja personel, kepatuhan terhadap SOP dan kepatuhan terhadap regulasi. *Journal of Engineering and Transportation, 2*(1), 11–22.

Rasyid, M., & Kurniawati, E. (2023). Reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran pasca penetapan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 9*(1), 102–115.

Riantoko, D., & Susanto, A. (2021). Pengukuran kinerja anggaran berbasis outcome dalam lembaga publik. *Jurnal Kebijakan Fiskal, 5*(2), 67–79.

Santoso, R., & Lestari, P. (2022). Studi kasus dalam penelitian manajemen publik: Pendekatan, keabsahan, dan tantangan analisis data. *Jurnal Metodologi Ilmu Sosial, 4*(1), 15–28.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, D., & Wibowo, T. (2023). Implementasi triangulasi dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora, 9*(2), 44–53.

Triana, E., & Kusuma, A. (2022). Validasi data penelitian kualitatif: Konsep dan praktik di lapangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11*(1), 77–88.

Widodo, A. (2020). Penerapan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian kebijakan publik di sektor pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6*(3), 142–154.

Wijaya, H., & Suharto, T. (2021). Pengaruh koordinasi antarunit kerja terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 4*(3), 211–223.

Wulandari, R., & Saputra, I. (2023). Analisis efektivitas perencanaan anggaran terhadap penyerapan dana pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 10*(1), 25–39.

Wulaningrum, P. D., Akbar, R., & Sari, M. R. (2020). Isomorphism, human resource capability and its role in performance measurement and accountability. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7*(12), 1099–1110.

Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.